



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR: 180-76 -2025

TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Februari 2025

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PJ. SEKRETARIS DAERAH,

  
YOZARWARDI USAMA PUTRA

Tembusan:  
Gubernur Sumatera Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 180- ~~76~~ -2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2025

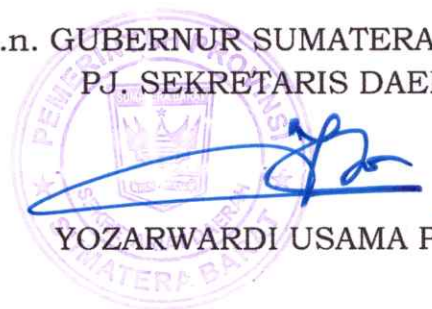
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

| NO. | JUDUL RANPERGUB                                                                                                                                                                                                  | OPD PEMRAKARSA                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Roadmap Sanitasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029                                                                                                                                                         | BAPPEDA                                                   |
| 2.  | Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat                                                                                                                 | BAPPEDA                                                   |
| 3.  | Sistem Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                                                                  | BIRO ORGANISASI                                           |
| 4.  | Penunjukan Petugas Pelaksana Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Mutu Produk Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat | DINAS<br>PETERNAKAN DAN<br>KESEHATAN<br>HEWAN             |
| 5.  | Komoditas Unggulan Perkebunan, Gambir, Penguatan Kelembagaan Usaha, Perkebunan dan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif                                                                                      | DINAS<br>PERKEBUNAN DAN<br>TANAMAN PANGAN<br>HOLTIKULTURA |
| 6.  | Penyelenggara Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Secara Terintegrasi/Corporate University pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ASN Sumbar Corpu)                              | BPSDM                                                     |
| 7.  | Percepatan Penanguulangan Tuberkulosis                                                                                                                                                                           | DINAS KESEHATAN                                           |
| 8.  | Pola Tata Kelola Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan                                                                 | BAPPEDA                                                   |
| 9.  | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan                                                                                                                     | DINAS KEARSIPAN                                           |

|     |                                                                                                                                                                                                |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10. | Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi | DINAS<br>PERHUBUNGAN                         |
| 11. | Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di Daerah                                                                                                 | DINAS SDA & BK                               |
| 12. | Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, Dan Standar Pelayanan Minimal 8 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri                                                                                          | BIRO<br>PEREKONOMIAN                         |
| 13. | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                                                                         | DINAS KOPERASI<br>DAN UKM                    |
| 14. | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                              | DINAS<br>PERINDUSTRIAN<br>DAN<br>PERDAGANGAN |
| 15. | Harga Satuan Pokok Kegiatan                                                                                                                                                                    | BPKAD                                        |
| 16. | Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah                                 | DINAS KESEHATAN                              |
| 17. | Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat                                                                                                                              | BKD                                          |
| 18. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.                                                                                     | BAPPEDA                                      |
| 19. | Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah.                                                                                                                       | BALITBANG                                    |
| 20. | Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pelabuhan Carocok Painan                                                                                               | DINAS<br>PERHUBUNGAN                         |
| 21. | Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.                                                                       | BKD                                          |
| 22. | Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.                                                                                                                            | BKD                                          |

|     |                                                                                                                                 |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23. | Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.                                                                                          | BPKAD         |
| 24. | Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.                                                                    | BPBD          |
| 25. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana.                                       | BPBD          |
| 26. | Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. | SATPOL PP     |
| 27. | Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat                                 | SATPOL PP     |
| 28. | Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.              | DPMD          |
| 29. | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender                                                                                              | DP3AP2KB      |
| 30. | Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat                                                   | DISNAKERTRANS |
| 31. | Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Pangan                                                                | DINAS PANGAN  |

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PJ. SEKRETARIS DAERAH,

  
YOZARWARDI USAMA PUTRA